

MENGATUR DESA WISATA: PERAN TOKOH MASYARAKAT MEMBANGUN INISIATIF KOLEKTIF DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS

Organising Rural Tourism: The Role of Local Champion to Build
Collective Initiatives in the Development of Community-Based
Tourism

Gangsar Hanajayani¹, S Sariffuddin¹

Diterima: 20 Februari 2018

Disetujui: 6 Juni 2018

Abstrak: Fenomena terus berkembangnya desa wisata di Indonesia tidak diimbangi oleh kapasitas skill dan pengetahuan professional pada pengelolanya. Secara otodidak dan *learning by doing* mereka berproses untuk mewujudkan desa wisata untuk kapitalisasi sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan. Tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci pengembangan desa memiliki peran penting dalam menggerakkan warga hingga memasarkan. Pentingnya tokoh masyarakat ini menjadi tujuan artikel ini yaitu peran tokoh masyarakat di dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Studi kasus diambil dari pengelolaan Desa Wisata Kaligono Kabupaten Purworejo yang merupakan salah satu desa wisata terbaik nasional menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif melalui penentuan informan wawancara berdasarkan snowballing, artikel ini menyajikan informasi mengenai peran tokoh masyarakat di dalam mengelola desa wisata, belajar dan membangun inisiatif kolektif pengelolaan desa wisata. Di balik rendahnya skill dan pengetahuan professional, masyarakat mampu melakukan pengelolaan desa wisata dengan mengandalkan kekuatan kohesi sosial untuk menciptakan inisiatif kolektif.

Keyword: desa wisata, tokoh masyarakat, inisiatif kolektif

Abstract: The phenomenon of the continuous development of rural tourism in Indonesia is not balanced by skill capacity and professional knowledge on the managers. By self-taught and learning by doing they proceed to realize the rural tourism to capitalize local resources in order to improve their welfare. Community leaders as key figures in village development have an important role in mobilizing people to marketing (the village). The importance of community leaders is the goal of this article, focusing on the role of community leaders in the management of community-based tourism. The case study was taken from the management of Kaligono Tourism Village in Purworejo Regency which is one of the best national rural tourism according to the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2014. Using qualitative methods by selecting interviewees as the informants through snowballing, this article provides information on the role of community leaders in managing the rural tourism, learning and building collective initiatives for rural tourism management. Despite the the low skill and professional knowledge, the community is able to manage the rural tourism by relying on the power of social cohesion to create collective initiatives.

Keywords: rural tourism, local champion, collective initiative

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

Desa wisata sebagai strategi pembangunan pedesaan di Indonesia merupakan fenomena baru yang cukup menyita perhatian seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha hingga perguruan tinggi. Fenomena ini bukanlah hal baru, di beberapa negara juga telah berlangsung seperti di Amerika (Marcouiller, 1997) yang menawarkan perencanaan integratif, Tansania (Anderson, 2015) dan Romania (Silviu, Oana, Stefania, & Victor, 2011) yang mengembangkan dari dimensi sosial ekonomi, dan Portugal (Kastenholz, Carneiro, Peixeira Marques, & Lima, 2012) dengan memanfaatkan desa-desa bersejarah. Khusus Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi faktor kunci untuk meningkatkan pendapatan ekspor non-migas, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan infrastruktur. Pada tahun 2009, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio mencapai 0,37, yang berarti 1 persen rakyat Indonesia yang memiliki dan menikmati 37 persen kekayaan Indonesia (BPS, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sangat timpang. Sebesar 14,15% penduduk Indonesia atau sebesar 32,53 juta jiwa hingga tahun 2009 pun berada dibawah garis kemiskinan (TNP2K, 2015). Keprihatinan ini menjadi salah satu alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. PNPM Mandiri sendiri terdiri dari 12 program yang salah satu kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan nasional adalah PNPM Mandiri dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Bertujuan meningkatkan kesejahteraan (Asker, Boronyak, Carrard, & Paddon, 2010) konsep pariwisata berbasis komunitas sering digunakan sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal. Konsep ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam mengelola pariwisata agar mereka memiliki kontrol dan terlibat dalam pengelolaan serta sebagian besar hasil usaha pariwisata dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat (Muganda, Sirima, & Ezra, 2013; Puspasari & Sariffuddin, 2015; Razzaq dkk., 2013; Snyman, 2012). Karena tujuan itu, maka pariwisata berbasis komunitas harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan warga sebagai langkah membangun industri pariwisata yang lebih mengakomodasi inisiatif, kebutuhan dan peluang masyarakat lokal (Pinel, 1968). Kemandirian masyarakat dalam mengelola asset menjadi kunci sukses penyelenggaraan pariwisata berbasis komunitas (Harrill, 2004; Silviu dkk., 2011). Mereka harus memiliki komitmen yang sama dan memiliki tujuan pengembangan pariwisata pedesaan yang sama pula. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan terbentuk tatanan sosial masyarakat yang berkelanjutan (Choi & Sirakaya, 2006) dengan cara mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan juga melindungi lingkungan, bangunan, dan memberikan pengalaman yang menarik bagi para wisatawan (Bramwell & Lane, 1993; Mbaiwa, 2011). Bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat (Asker dkk., 2010) konsep pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) sering digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah membuka lapangan kerja baru di pedesaan dan pada akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan desa. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat secara endogen, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab dan hak mengelola seluruh aktivitas pariwisata (Armstrong, 2012). Di dalam konsep ini, masyarakat memiliki control dan terlibat dalam manajemen serta sebagian besar manfaatnya diberikan kepada masyarakat (Razzaq dkk., 2013), konsep ini merupakan model pengembangan yang berlandaskan pada asumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat (Pinel, 1968). Sejalan dengan Pinel (1968) adalah Matilainen, Suutari, Lähdesmäki, dan Koski (2018) yang mengatakan bahwa dukungan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata sangatlah penting untuk

menjamin keberlanjutan dan transfer pengetahuan. Bukan hanya inisiatif 1 atau beberapa orang saja yang diperlukan, tetapi lebih terpenting adalah bagaimana bisa berkomunikasi dan menggabungkan berbagai inisiatif bersifat kolektif.

Akan tetapi dibalik positifnya tujuan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, masyarakat memiliki keterbatasan skill dan pengetahuan profesional dalam mengelola usaha baru (Anderson, 2015; Gössling, 2002). Perjalanan mereka dalam upaya mengelola dan mengkapitalisasi sumber daya budaya dan alam untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka menjadi satu kajian yang menarik. Tidak jarang gagalnya pengelolaan desa wisata karena faktor koordinasi dan komitmen masyarakat dalam menjalankan usaha mereka (Matilainen dkk., 2018). Kenyataan yang tidak boleh dikesampingkan adalah komitmen masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka masih tidak konsisten baik dari upaya mewujudkan tujuan bersama maupun dalam koordinasi antar warga (Ashley & Mitchell, 2009).

Komitmen menjadi faktor terpenting untuk membangun inisiatif masyarakat secara kolektif. Beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan komitmen masyarakat di teliti untuk mengetahui persepsi dan cara pandang masyarakat terhadap obyek wisata sehingga secara personal mereka akan berperilaku sesuai dengan komitmen mereka. Dari perspektif ekonomi penelitian serupa sudah dilakukan oleh Moghavvemi, Woosnam, Paramanathan, Musa, dan Hamzah (2017) yang menyimpulkan adanya hubungan signifikan antara pemahaman, emosi dan komitmen komunitas dalam berperilaku untuk mendukung pariwisata. Kemudian dari perspektif ekologi dengan menggabungkan konsep social-ecological resilience dilakukan oleh Ruiz-Ballesteros (2011) yang menyimpulkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata berbasis komunitas lebih menjamin keberlangsungan ekologi. Begitupula Yang, Li, dan Huang (2017) yang meneliti pengaruh persepsi online terhadap komitmen komunitas. Cukup berbeda perlakuan pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang diteliti oleh Ruiz-Ballesteros (2011), Moghavvemi dkk. (2017) dan Yang dkk. (2017), eksplorasi mengenai bagaimana komitmen komunitas di dalam proses pengelolaan dari internal belum banyak diungkap. Berlandaskan pada persoalan itu maka peneliti ini akan mengkaji peran tokoh masyarakat (local champion) di dalam menggerakkan dan mengembangkan masyarakat sehingga mereka memiliki komitmen Bersama di dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Wisata Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Desa Wisata ini cukup unik, karena hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun sudah bisa menjadi salah satu desa wisata terbaik nasional menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Di dukung oleh program pemerintah mengenai PNPM Mandiri Bidang Pariwisata, perkembangan desa wisata ini terus menanjak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif melalui sampel penelitian snowballing diterapkan dalam penelitian ini dengan tujuan agar memahami secara konkrit mengenai peran tokoh masyarakat di dalam pengelolaan desa wisata. Snowballing diterapkan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat secara lnsung maupun tidak langsung dalam mengatur desa wisata. Seluruh informan/ nara sumber di sajikan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Informan dan target informasi penelitian

No	Informan	Target Informasi
1	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Dukungan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan Desa Wisata Kaligono
2	Ketua <i>Forum for Economic Development and Employment</i>	Bentuk koordinasi antar stakeholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata

No	Informan	Target Informasi
	<i>Promotion</i> (FEDEP) Kabupaten Purworejo	
3	Pemerintah Kecamatan Kaligesing	Sejarah perkembangan Desa Wisata
4	Pemerintah Desa Kaligono	Bentuk pengelolaan desa wisata
5	Ketua Pokdarwis Nuansa Alam Kaligono	Bentuk operasional pengelolaan desa wisata
6	Ketua Pokdarwis Joko Kendil	Bentuk operasional pengelolaan desa wisata
7	Ketua Dusun I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI	Partisipasi dalam pengelolaan desa wisata

Selanjutnya dengan menggunakan metode *content analysis* bersumber dari transkrip wawancara, dilakukn pengkodean informasi untuk melakukan cross check informasi antara satu informan dengan informal lainnya. Adapun target informasi yang ingin diketahui adalah:

- Siapa saja tokoh masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan desa wisata?
- Bagaimana sejarah terbentuknya desa wisata Kaligono?
- Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan desa wisata? dan
- Bagaimana manajemen yang dilakukan untuk mengatur multi stakeholder yang begitu banyak baik dari dalam maupun dari luar?

Transkrip wawancara bukanlah satu-satunya sumber informasi yang digunakan di dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen terkait dengan pengembangan desa wisata seperti kajian pengembangan desa wisata dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, peraturan desa dan dokumen-dokumen penelitian sebelumnya juga menjadi rujukan utama penelitian. Bahan-bahan dokumen sekunder ini dijadikan materi tambahan untuk melakukan verifikasi sekunder setiap informasi yang didapatkan dari hasil wawancara. Metode *cross check* berupa memverifikasi hasil informasi dari tokoh satu dengan tokoh lainnya dilakukan untuk melakukan validasi data dan informasi. Jika ada informasi yang berulang antar satu tokoh dengan tokoh lainnya maka diartikan sebagai kesamaan informasi dan data. Ini menunjukkan tingkat validitas data/ informasi yang tinggi.

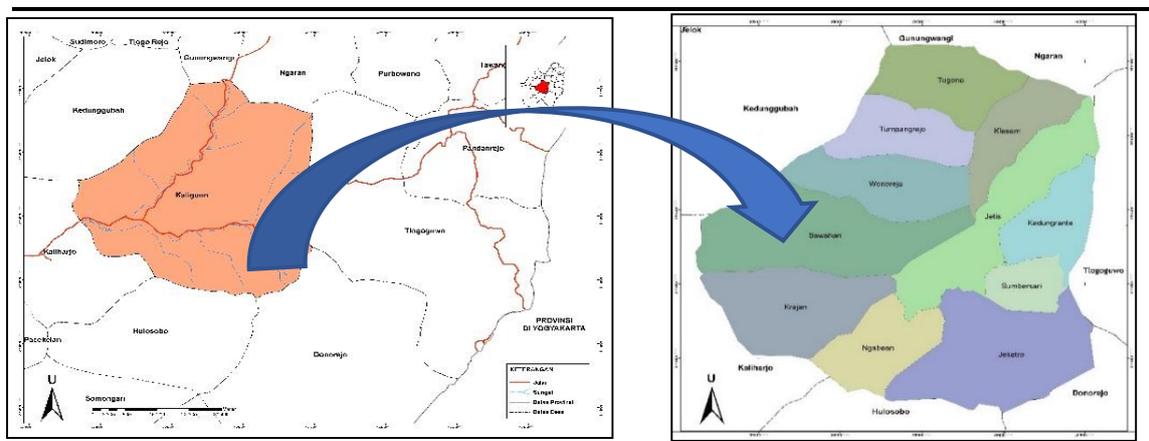
HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Kaligono

Desa Wisata Kaligono yang berhasil mengembangkan konsep desa wisata ini berlokasi sekitar 10 km dari pusat kota Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa dengan luas wilayah 893,310 ha ini terdiri atas 11 RW (dusun), dan 41 RT (lihat gambar 1). Dalam perkembangannya, desa ini telah memperoleh penghargaan desa wisata nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga memperoleh peringkat keempat dari kegiatan festival desa wisata. Puncak prestasinya pada tahun 2014, Desa Wisata Kaligono masuk dalam sepuluh besar desa wisata terbaik nasional. Capaian ini tidak lepas dari program PNPM Mandiri Pariwisata yang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- pada tahun 2011 dan Rp. 100.000.000,- pada tahun 2012. Keberhasilan membuka lapangan pekerjaan baru, Desa ini kemudian menjadi desa binaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011-2013.

Atraksi wisata alam berupa air terjun bernama Curug Siklotok menjadi pioneer dibukanya atraksi-atraksi lain di Desa Kaligono. Hingga saat ini sudah ada 5 atraksi baru meliputi atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, atraksi wisata edukatif, atraksi wisata religi, dan atraksi wisata kuliner. Atraksi wisata alam meliputi Curug Siklothok dan Taman

Sidandang. Atraksi wisata budaya meliputi kuda lumping, tari dolalak, incling, wayang orang atau ketoprak, dan soyar maole atau karawitan. Wisata edukatif yang ditawarkan adalah pembuatan gula aren, perah susu kambing peranakan etawa, dan pembuatan wingko. Atraksi wisata religi yang ada adalah ziarah makam Kyai Ngabei dan wisata kuliner berupa kebun durian, manggis, dan kokosan di saat musim panen. Fasilitas akomodasi yang tersedia di Desa Wisata Kaligono meliputi *homestay*, rumah budaya, warung wisata, dan parkir. *Homestay* tersebar di beberapa dusun dengan pengelolaan secara mandiri oleh pemilik rumah, namun wisatawan yang ingin menginap perlu melalui Badan Pengelola Dewi Kano dan pokdarwis. Sementara wisata kuliner berupa warung-warung makanan dimiliki oleh masyarakat setempat yang dibangun secara swadaya. Penyelenggaraan Desa Wisata Kaligono dan penyediaan paket perjalanan Desa Wisata Kaligono dilakukan oleh Badan Pengelola Desa Wisata Kaligono bersama dengan Pokdarwis Nuansa Alam dan Pokdarwis Joko Kendil.



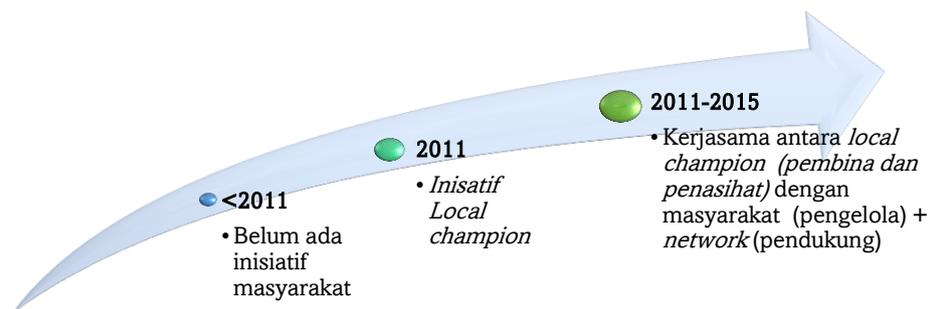
Gambar 1. Peta Administrasi Desa Kaligono

Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Kaligono

Menariknya pesona alam Curug Siklotok di Desa Kaligono mengundang banyak wisatawan di sekitar Kabupaten Purworejo. Puncak tingginya kunjungan terjadi pada tahun 2009– 2010 yang membuat masyarakat setempat resah dan khawatir atas kemungkinan tindakan asusila para muda-mudi di obyek wisata. Bermula dari keresahan tersebut, kepala dusun Jeketro, dimana curug Siklothok berada, menemui Kepala Desa Kaligono yang kemudian menyepakati untuk mengembangkan obyek Curug Siklotok sebagai obyek wisata. Merealisasikan kesepakatan tersebut, pada tanggal 9 Januari 2011 Pokdarwis Nuansa Alam dibentuk untuk mengelola Curug Siklotok yang dikuatkan oleh Peraturan Desa No. 5 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pengelolaan Obyek Wisata Desa Kaligono.

Inisiatif yang bermula dari tokoh masyarakat yang kemudian bersinergi dengan pemerintah desa seperti narasi di atas, menjadi pendorong perkembangan Desa Wisata Kaligono. Dalam perkembangannya, kemudian banyak pihak dari luar pemerintah desa yang tertarik dan ikut terlibat di dalam mendukung Des Wisata Kaligono. Pihak luar yang terlibat tersebut adalah Universitas Gajah Mada; komunitas Cah Purworejo Perantauan; Java Promo, Bogowonto Indonesia Adventure; dan PT. Telkom. Tantangan baru yang harus diterima tokoh masyarakat dan pengurus desa adalah banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai stakeholder sedangkan mereka tidak memiliki dokumen perencanaan sebagai

panduan. Mereka harus belajar bersama dan mempertimbangkan berbagai konsep yang ditawarkan oleh mitra kerjasama.



Gambar 2. Perkembangan Peran Stakeholder Desa Wisata Kaligono

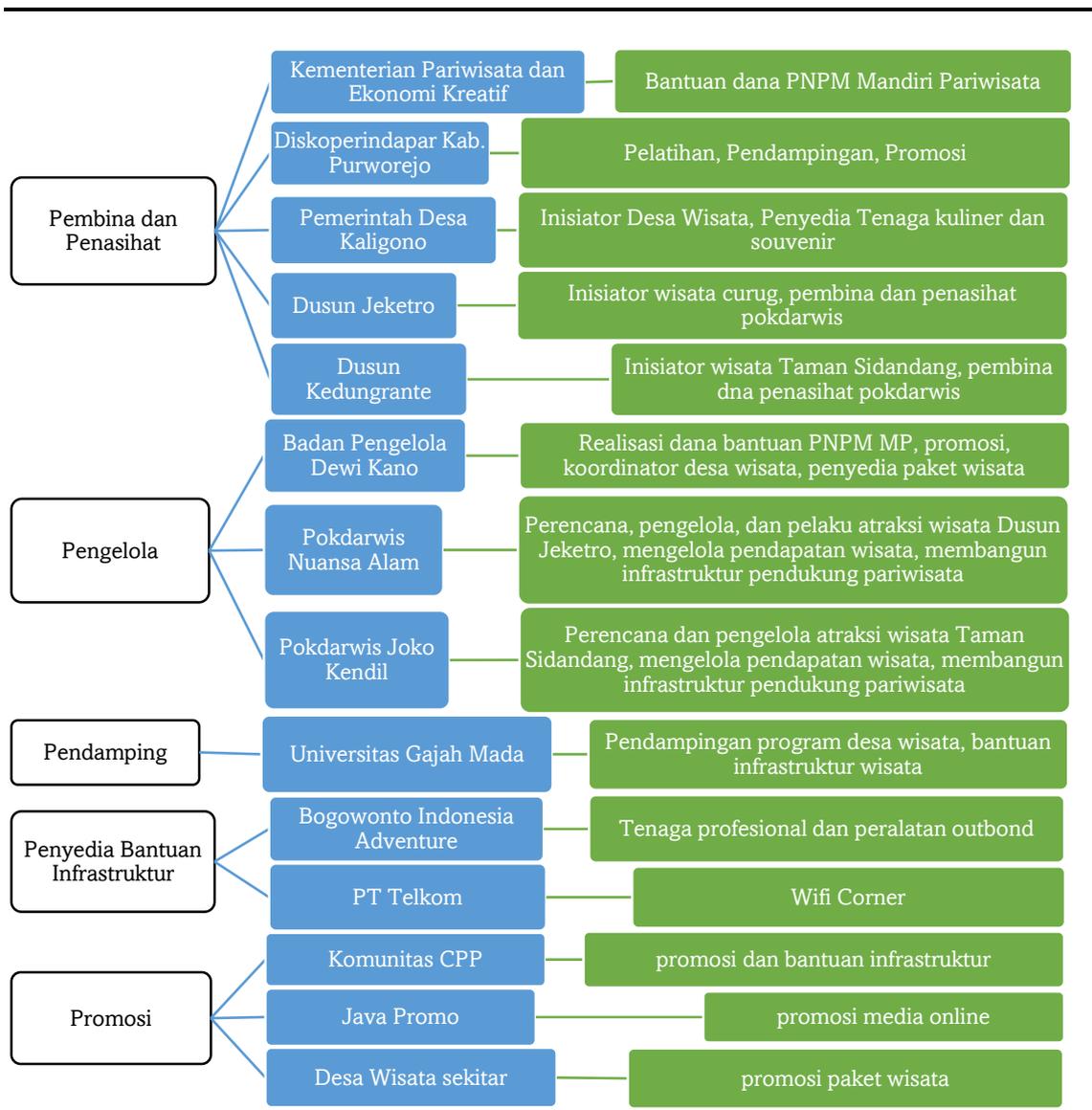
Perkembangan peran stakeholder dalam pembangunan Desa Wisata Kaligono ditunjukkan oleh gambar 2. Pada sebelum tahun 2011, obyek wisata berupa Curuk Siklotok belum dikelola oleh masyarakat. Meskipun demikian, tetap banyak para wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam. Mulai ada inisiatif di tahun 2011 melalui rapat dusun (RW) untuk mengembangkan desa wisata agar lebih terkelola dan untuk mengantisipasi kemungkinan perbuatan asusila dari para wisatawan. Kemudian dari inisiasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2011-2015. Perkembangan Desa Wisata Kaligono tidak terlepas dari berbagai dukungan stakeholder baik internal maupun eksternal. Setidaknya seluruh stakeholder tersebut, baik internal maupun eksternal, dapat dikelompokkan menjadi 5 menurut fungsi dan perannya. Peran tersebut meliputi pembina dan penasihat, pengelola desa wisata, pendamping, penyedia bantuan infrastruktur, dan promosi. Meski demikian, di dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan dalam pengembangan Dewi Kano dilakukan melalui diskusi bersama Badan Pengelola Dewi Kano, pokdarwis, dan pemerintah desa maupun dusun sebagai nasihat. Keputusan diambil berdasarkan persetujuan masyarakat dalam hal ini pokdarwis, baik Pokdarwis Nuansa Alam ataupun Pokdarwis Joko Kendil. Merujuk pada Reed dkk. (2009), gambar 3 menunjukkan peta stakeholder menurut tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan desa Wisata Kaligono.

Hubungan keterkaitan antar stakeholder

Pokdarwis Nuansa Alam dan Pokdarwis Joko Kendil merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar dalam pengembangan desa wisata. Hal tersebut dikarenakan pokdarwis merupakan perencana, pengelola, dan penerima manfaat terbesar dari pendapatan wisata. Sementara stakeholder yang memiliki pengaruh besar namun kepentingan kecil dari pengembangan Desa Wisata Kaligono meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Diskoperindagpar, Pemerintah Desa, Pemerintah Dusun, Badan Pengelola Dewi Kano, Bogowonto Indonesia Adventure, dan komunitas CPP. Universitas Gajah Mada, desa wisata di Kulonprogo dan Sleman, serta Java Promo memiliki kepentingan yang besar namun pengaruhnya kecil. PT Telkom sendiri memiliki pengaruh dan kepentingan yang kecil terhadap pengembangan desa wisata. Lebih lanjut hubungan antara kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Kaligono disajikan dalam Gambar 4.

Desa Wisata Kaligono telah mampu bertahan dan terus berkembang hingga lima tahun. Pengelolaan yang digunakan Dewi Kano adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang menuntut peran aktif masyarakat. Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di

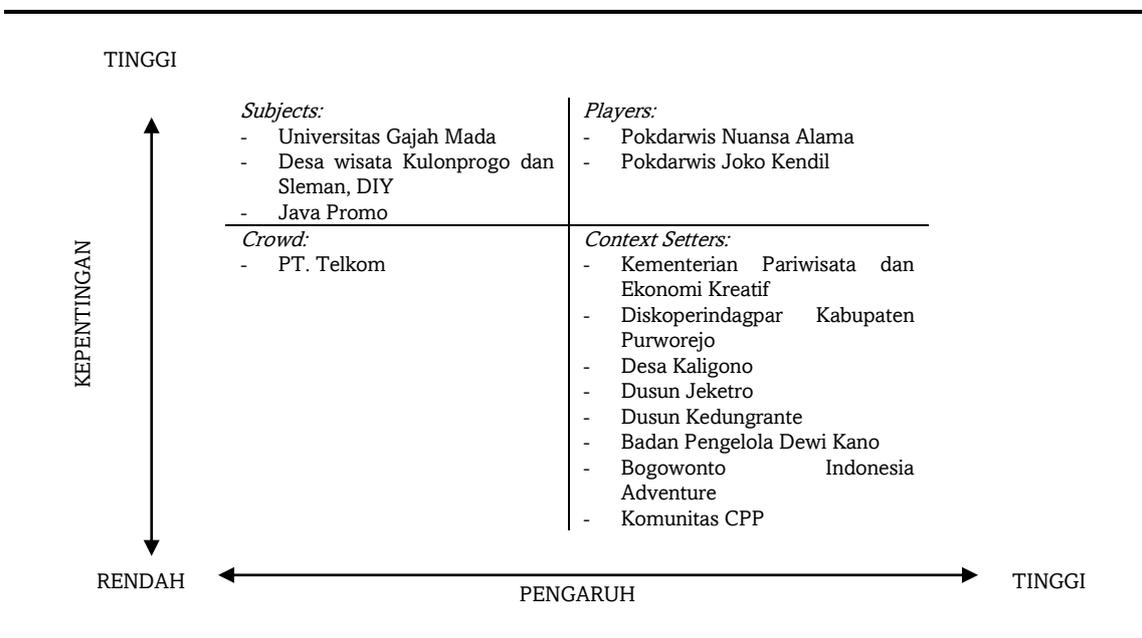
Barabarani Tanzania yang diulas oleh Muganda dkk. (2013). Bentuk peran masyarakat di Dewi Kano menjadi *stakeholder* yang mempengaruhi keputusan berbeda dengan di Barabarani dimana masyarakat menjadi pihak yang dipengaruhi keputusan. Dalam pengembangan Dewi Kano, masyarakat berperan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan dan mengutamakan kepentingan masyarakat atau *bottom-up*.



Gambar 3 Peran stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Kaligono

Di Desa Wisata Kaligono ini, pokdarwis memiliki peranan penting dalam pengembangan desa wisata, dimana bentuk peran masyarakat dalam pokdarwis dibagi menjadi tiga yaitu penataan ruang kawasan, pengembangan atraksi wisata, dan menjalin kerjasama. Pokdarwis memiliki beberapa peran sekaligus dalam pengelolaan desa wisata seperti pengembangan atraksi wisata Curug Siklothok dan Taman Sidandang. Pokdarwis juga secara mandiri menambahkan atraksi wisata yang dapat dilakukan wisatawan seperti *flying fox*, *canyoning*, dan ciblun. Sedangkan untuk penataan ruang kawasan desa wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa Kaligono sebagai yang memiliki kewenangan untuk merencanakan desanya. Pokdarwis pun secara swadaya membangun fasilitas pendukung

pariwisata seperti parkir, kamar mandi, kamar ganti, gazebo, dan jalan wisata. Pokdarwis Joko Kendil juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Bogowonto Indonesia Adventure. Pokdarwis Nuansa Alam maupun Joko Kendil pun menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah untuk bantuan dana dan promosi. Keberlangsungan pariwisata di Desa Wisata Kaligono berada dibawah kontrol pokdarwis.



Gambar 4. Matriks Analisa Stakeholder Desa Wisata Kaligono

Tokoh masyarakat melalui Pokdarwis menggerakkan keikutsertaan masyarakat untuk terlibat di dalam industri pariwisata. Dalam perkembangannya, tokoh masyarakat berubah fungsi dari fasilitator, kemudian menjadi operator dan pada akhirnya menjadi manajer. Perubahan fungsi dan peran ini bergantung pada kebutuhan. Ada peran yang begitu fleksibel, dari pengelola menjadi salah satu factor kunci keberhasilan desa wisata. Meskipun pada awalnya inisiatif pengembangan desa wisata dari para warga pria, tetapi pada perkembangannya juga melibatkan peran perempuan seperti yang di temukan di Kudus menurut penelitiannya Puspasari dan Sariffuddin (2015). Kaum wanita berperan sebagai pemilik warung menjual makanan dan minuman baik di Curug Siklothok maupun di Taman Sidandang, ada pula sebagai penjaga loket. Kebersihan juga menjadi tanggung jawab kaum wanita yang dilakukan setiap hari jumat dalam kegiatan kerja bakti di Taman Sidandang. Sementara kaum laki-laki lebih berperan sebagai petugas parkir, penjaga loket dan pemandu. Desa wisata yang berhasil menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kontogeorgopoulos, Churyen, dan Duangsaeng (2014) didorong oleh adanya pembagian peran antar-*stakeholder* sesuai kapasitasnya. Pembagian peran yang dilakukan di Mae Kampong hampir serupa dengan di Desa Wisata Kaligono, yaitu adanya dukungan eksternal dari Pemerintah dan akademisi. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Pengelola Dewi Kano bukan oleh kepala desa, yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kepala dusun. Masyarakat di Dewi Kano berupa pokdarwis berperan sebagai penyedia atraksi wisata, pemandu wisata, layanan akomodasi seperti homestay dan warung. Pendapatan yang diperoleh pun dialokasikan untuk anggota pokdarwis, organisasi pokdarwis, desa, dan dusun namun tidak ada alokasi untuk Badan Pengelola Dewi Kano. Badan Pengelola Dewi Kano menjadi lembaga non-profit. Hal lain yang berbeda dengan Mae Kampong adalah keberhasilan Dewi Kano tergantung pada keputusan masyarakat dalam bentuk pokdarwis

Konsep pengelolaan Desa Wisata Kaligono ini memiliki kesamaan dengan pengembangan Desa Wisata Pentingsari yang mana sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil seperti yang diulas oleh Purbasari dan Asnawi (2014). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari dan Desa Wisata Kaligono sama-sama dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan Pemerintah melalui bantuan dana dari PNPM Mandiri Pariwisata, promosi, pelatihan keterampilan, pendampingan dan pembinaan. Sementara masyarakat desa setempat menjadi pelaku atraksi wisata yang secara mandiri berperan dalam merencanakan, menciptakan, mengelola, promosi dan mengembangkan daya tarik wisata dan layanan akomodasi seperti homestay maupun warung. Oleh karena itu hasil pendapatan wisata yang masuk akan kembali untuk masyarakat dan pengembangan wisata selanjutnya. Desa Wisata Pentingsari sendiri sudah menjadi peringkat pertama desa wisata nasional pada tahun 2013 sehingga tak heran jika Dewi Kano yang memiliki konsep pengelolaan yang serupa dapat masuk sepuluh besar desa wisata terbaik nasional pada tahun 2014.

KESIMPULAN

Praktik pengembangan Desa Wisata Kaligono ini tumbuh dan berkembang dari inisiatif masyarakat desa (endogen). Sementara masyarakat Desa Kembangarum berlaku sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah Desa Kaligono dan Dusun Jeketro maupun Kedungrante sendiri sebagai pembuka aktivitas pariwisata Desa Kaligono memberdayakan masyarakat desa dalam pokdarwis untuk mengelola pariwisata tersebut. Pengelolaan dilakukan pokdarwis dibawah naungan Badan Pengelola Dewi Kano sebagai koordinator dan menjalin kemitraan. Sementara selanjutnya Pemerintah berlaku sebagai pembina dan penasihat Dewi Kano. Masyarakat desa yang memiliki kohesi sosial tinggi karena perasaan kekeluargaannya ternyata berpengaruh pada pengambilan keputusan kolektif. Ada inisiatif kolektif yang bersumber dari warga masyarakat untuk didengarkan oleh tokoh masyarakat dan kemudian dikembalikan ke warga untuk menjadi kesepakatan bersama. Peran manajerial melalui kesepakatan bersama warga menjadi rujukan tokoh masyarakat melakukan tindakan. Mereka bersepakat mengatur bersama bukan hanya inisiatif yang bersifat kolektif tetapi juga pembagian kerja yang juga disepakati secara kolektif. Temuan ini sejalan dengan Pinel (1968) mengenai fungsi peran inisiatif di dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. -Ing. Asnawi Manaf, ST dan Ir. Holi Bina Wijaya, MUM yang telah memberikan koreksi dan masukan selama pembahasan dan ujian tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, W. (2015). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 13(3), 208-224. doi:10.1080/14766825.2014.935387
- Armstrong, R. (2012). An analysis of the conditions for success of community based tourism enterprises. *ICRT Occasional Paper(OP21)*, 1-52.
- Ashley, C., & Mitchell, J. (2009). *Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity*: Taylor & Francis.
- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). Effective community based tourism: a best practice manual.
- BPS. (2014). *Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2007-2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1-5. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/09669589309450696>

- Choi, H. C., & Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. *Tourism Management*, 27(6), 1274-1289. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.018>
- Gössling, S. (2002). Market Integration and Ecosystem Degradation: Is Sustainable Tourism Development in Rural Communities a Contradiction in Terms? *Environment, Development and Sustainability*, 5(3), 383-400. doi:10.1023/a:1025777029741
- Harrill, R. (2004). Residents' Attitudes toward Tourism Development: a Literature Review with Implications for Tourism Planning. *Journal of Planning Literature*, 18(3), 251-266. doi:<http://dx.doi.org/10.1177/0885412203260306>
- Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Peixeira Marques, C., & Lima, J. (2012). Understanding and managing the rural tourism experience — The case of a historical village in Portugal. *Tourism Management Perspectives*, 4, 207-214. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.009>
- Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2014). Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership. *Tourism Planning & Development*, 11(1), 106-124. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/21568316.2013.852991>
- Marcouiller, D. W. (1997). Toward Integrative Tourism Planning in Rural America. *Journal of Planning Literature*, 11(3), 337-357. doi:10.1177/088541229701100306
- Matilainen, A., Suutari, T., Lähdesmäki, M., & Koski, P. (2018). Management by boundaries – Insights into the role of boundary objects in a community-based tourism development project. *Tourism Management*, 67, 284-296. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.02.003>
- Mbaiwa, J. E. (2011). Changes on traditional livelihood activities and lifestyles caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana. *Tourism Management*, 32(5), 1050-1060. doi:10.1016/j.tourman.2010.09.002
- Moghavvemi, S., Woosnam, K. M., Paramanathan, T., Musa, G., & Hamzah, A. (2017). The effect of residents' personality, emotional solidarity, and community commitment on support for tourism development. *Tourism Management*, 63, 242-254. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.021>
- Muganda, M., Sirima, A., & Ezra, P. M. (2013). The Role of Local Communities in Tourism Development: Grassroots Perspectives from Tanzania. *Journal of Human Ecology*, 41(1), 53-66. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/09709274.2013.11906553>
- Pinel, D. P. (1968). Create a good fit: A community-based tourism planning model. *gen*, 1986(97).
- Purbasari, N., & Asnawi, A. (2014). Keberhasilan Community Based Tourism di Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari dan Nglanggeran. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(3), 476-485.
- Puspasari, D. A., & Sariffuddin, S. (2015). Peran Gender dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Colo Kabupaten Kudus. *Tataloka*, 17(4), 223-230. doi:<https://doi.org/10.14710/tataloka.17.4.223-230>
- Razzaq, A. R. A., Mohamad, N. H., A.Kader, S. S. S., Mustafad, M. Z., Hadi, M. Y. A., Hamzah, A., & Khalifah, Z. (2013). Developing Human Capital for Rural Community Tourism: Using Experiential Learning Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 1835-1839. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.126>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., . . . Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Ruiz-Ballesteros, E. (2011). Social-ecological resilience and community-based tourism: An approach from Agua Blanca, Ecuador. *Tourism Management*, 32(3), 655-666. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.021>
- Silviu, B., Oana, P., Stefania, N., & Victor, O. (2011). The socio-economic dimension of rural development for the North-East region of Romania. *African Journal of Agricultural Research*, 6(28), 6042-6051. doi:10.5897/AJAR11.082
- Snyman, S. (2012). Ecotourism joint ventures between the private sector and communities: An updated analysis of the Torra Conservancy and Damaraland Camp partnership, Namibia. *Tourism Management Perspectives*, 4, 127-135. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2012.07.004>
- TNP2K. (2015). *Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: The National Team for The Acceleration of Poverty Reduction.
- Yang, X., Li, G., & Huang, S. S. (2017). Perceived online community support, member relations, and commitment: Differences between posters and lurkers. *Information & Management*, 54(2), 154-165. doi:<https://doi.org/10.1016/j.im.2016.05.003>